

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**



**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuni-Nya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021 walaupun ada kekurangan dan keterbatasan.

Pada dasarnya pembuatan LKjIP ini mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di masing – masing SKPD sehingga bisa berdaya guna, berhasil guna, dipertanggungjawabkan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan organisasi dalam rangka perwujudan pemerintahan yang Good Government. Hal ini merupakan cerminan dari semua kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dalam satu tahun, kemudian dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja tahun berikutnya.

Demikian LKjIP ini kami buat, kami percaya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Purwodadi, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

WAHYU SUSETIJONO, SH, MM
NIP. 19680418 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum	2
D. Aspek-Aspek Strategik Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Grobogan 2016-2021	7
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dituntut untuk mewujudkan administrasi pemerintah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang tepat, jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan di berbagai bidang diantaranya bidang kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah perlu mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan tugas-fungsi secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja secara periodik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. GAMBARAN UMUM

1. Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, maka susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPPKAD
2. Bagian Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak I
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak I
 - c. Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak I
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak II
 - c. Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II
5. Bidang Administrasi Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan
 - b. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I
 - c. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II
6. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi I
 - b. Sub Bidang Akuntansi II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
7. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub Bidang Kas Daerah
8. Bidang Asset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan
 - b. Sub Bidang Administrasi Asset
 - c. Sub Bidang Penghapusan

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan, Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah”**. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah;
- b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan dibidang keuangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang keuangan Daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan telah didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan. Sumber Daya Aparatur yang ada dilingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
KUALIFIKASI PEGAWAI BPPKAD

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	1
	b. SMP	1
	c. SMA	18
	d. Sarjana Muda (D I – D III)	9
	e. S 1 dan D IV	33
	f. S 2	16
	g. S 3	0
	Jumlah	78
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	
	a. Golongan I	0
	b. Golongan II	21
	c. Golongan III	44
	d. Golongan IV	13
	Jumlah	78
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	7
	c. Eselon IV	20
	d. Staf	50
	Jumlah	78
4.	Pejabat Fungsional	-
	Jumlah	-

3. Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya aparatur, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Berikut ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Grobogan sampai dengan akhir Desember 2018 :

JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	HARGA
a. Tanah	15 Bidang	4.600.582.845,00
b. Peralatan dan Mesin		
- Alat-alat Besar (Genset)	1 unit	395.683.000,00
- Alat-alat Angkutan (Mobil, Motor)	71 unit	4.184.555.945,00
- Alat-alat Bengkel & Alat Ukur	6 unit	171.904.783,00
- Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	3.900 unit	5.601.225.702,00
- Alat-alat Studio & Komunikasi	30 unit	371.188.130,00
c. Gedung dan Bangunan	15 buah	4.647.115.279,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	6 buah	109.016.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	320 buah	17.307.314,00
Jumlah	1.732 unit	20.098.578.998,00

D. ASPEK-ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Setelah memperhatikan faktor internal dan eksternal, maka aspek - aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dengan kewenangan dan kemampuan Sumber Daya Manusia akan meningkatkan kredibilitas untuk menarik Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;
2. Dengan kemampuan dan kewenangan Sumber Daya Manusia serta dukungan pendanaan yang memadai maka dapat melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi organisasi kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia merupakan kebutuhan untuk menggali potensi dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pembinaan kepada masyarakat, merupakan syarat pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BPPKAD KABUPATEN GROBOGAN 2016-2021

1. Visi

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan makna visi tersebut, visi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021 antara lain "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh".

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke – 6 yaitu **"Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan public"**. Sedangkan Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD yang

sesuai dengan Misi ke – 6 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **“Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah”** dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator sarasannya yaitu Peningkatan PAD dan Opini WTP Laporan Keuangan BPK.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Grobogan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah. Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi dalam PAD melalui pembayaran online, peningkatan kesadaran Wajib Pajak, monitoring dan evaluasi, menggali potensi pajak dan retribusi, pembuatan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas SDM;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan pembukuan di setiap perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas laporan asset daerah melalui peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap perangkat daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan SPP secara tepat waktu;
- b. Optimalisasi pajak dan retribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Perangkat Daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;

- d. Peningkatan kapasitas pengelola asset Perangkat Daerah dan peningkatan peran pengelola asset daerah dalam pelaporan secara tepat waktu dan benar;

Tabel
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kinerja pengelolaan Keuangan daerah	Mempertahankan opini laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan laporan asset serta keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan SPP secara tepat waktu b. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Perangkat Daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah c. Peningkatan kapasitas pengelola asset Perangkat Daerah dan peningkatan peran pengelola asset daerah dalam pelaporan secara tepat waktu dan benar
		Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan	Meningkatnya PAD dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi dalam PAD melalui pembayaran online, peningkatan kesadaran WP, monitoring dan evaluasi, menggali potensi pajak dan retribusi, pembuatan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online 2. Optimalisasi pajak dan retribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagaimana tabel II.1 berikut :

**TABEL II.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Uraian	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Penjelasan
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,70%	10,96%	-0,10%	Salah satu faktor penurunan PAD karena pada tahun 2018 untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak termasuk didalamnya
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP		Opini terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018 menunggu hasil audit BPK

Catatan: rumus menghitung Peningkatan PAD = Kenaikan/ Penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu dikali 100% (PAD 2018 – PAD 2017) : PAD 2017 X 100% maka (Rp 117.953.970.212,00 - Rp 118.071.998.553,00) : Rp 118.071.998.553,00 x 100% = - 0,10%

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Awal tahun 2018 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Sasaran Strategis I :		
	Meningkatnya ketepatan dan kebenaran pelaporan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah (PD) dalam ketepatan dan kebenaran pelaporan keuangan	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 bln	12 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran komunikasi pelaksanaan tugas melalui telepon, faximile dan internet selama 100 bulan	12 bulan
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI selama 1 tahun	2 bidang
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	12 bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bulan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Ktr	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 15 item surat kabar, majalah dan tabloid selama 12 bulan	12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor selama 12 bulan	12 bulan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	12 bulan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	12 bulan
Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	Dilaksanakannya pengelolaan administrasi perbendaharaan selama 12 bln	12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPPKAD	Terealisasinya pembelian 2 AC, 4 PC, 5 Laptop, 5 Printer, 3 Unit Server, 2 UPS Server dan 1 Instalasi Jaringan	2 AC, 4 PC, 5 Laptop, 5 Printer, 3 Unit Server, 2 UPS Server dan 1 Instalasi Jaringan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 paket
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dilaksanakannya perawatan/servis 8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas selama 12 bulan	8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Dilaksanakannya perawatan peralatan gedung kantor AC, Jaringan Air Bersih, Telepon, Meubelair, APAR, Genset	12 bulan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dilaksanakannya Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	210 pakaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dilaksanakannya diklat, bimtek, sosialisasi, seminar selama 12 bln	12 bulan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dilaksanakannya sosialisasi perubahan Perda No.6 Thn 2010 di 100 WP	100 WP
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dilaksanakannya Bintek penyusunan anggaran berbasis kinerja melalui Simda Perencanaan sebanyak 120 orang	120 orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 120 orang	120 orang
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dilaksanakannya pembekalan penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD	160 orang
2	Sasaran Strategis 2		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dilaksanakannya cetak buku Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja, RKA, DPA Penetapan, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, Rencana Kerja, LkjIP, LPPD, dan LKPJ	12 bulan
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya buku lap keuangan SKPD TA. 2018 selama 4 triwulan	720 buku
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya buku lap keu Pemda selama 12 bln sebanyak 190 buku	190 buku
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuda	Terlaks Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuda	100 %
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Tersusunnya 5 ASB	5 ASB

Penyusunan Raperda tentang APBD	Tersusunnya 120 buku Raperda tentang APBD	120 buku
Penyusunan Perbup ttg Penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2019	Tersusunnya 120 buku Raperbup ttg Penjabaran APBD TA. 2019	120 buku
Penyusunan Raperda ttg Perubahan APBD	Dilaksanakannya pembuatan 120 buku Raperda ttg Perubahan APBD	120 buku
Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya 120 buku Raper Bupati	120 buku
Penyusunan Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya 150 Buku Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017	150 buku
Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya 160 buku peraturan KDH ttg Penjabaran pertanggungjawaban pelaks APBD	160 buku
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)	Dilaksanakannya penyusunan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuda (SIMDA Keuangan)	12 bulan
Sosialisasi Paket Regulasi ttg Pengelolaan Keuda	Dilaksanakannya bimtek penyusunan APBD TA. 2019 sebanyak 100 org	100 orang
Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Paket regulasi ttg pengelolaan keuda sbyk 165 peserta	165 orang
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dilaksanakannya peningkatan manajemen aset/ barang daerah di 49 OPD	49 OPD
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Dilaksanakannya peningkatan manajemen investasi daerah 6 BUMD	6 BUMD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dilaksanakannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di 280 desa	12 bulan
Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuda	Dilaksanakannya pembuatan 7 Perbup	7 Perbup

Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dilaksanakannya pembuatan Aplikasi Pajak Daerah Lainnya	12 bulan
Penatausahaan Belanja PPKD	Dilaksanakannya penata usahaan belanja bunga, bagi hasil,bankeu,penata usahaan belanja hibah, belanja bansos dan belanja tidak terduga	12 bulan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Dilaksanakannya cetak STS, Jurnal, Penyusunan Anggaran Kas APBD TA.2018, buku SPD, cetak IWP TA.2018	50 OPD
Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Lainnya	Tersedianya 360 buku pelaporan, monitoring dan rekonsiliasi pendapatan daerah lainnya selama 12 bulan	12 bulan
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Dilaksanakannya pensertifikatan tanah milik Pemkab. Grobogan	64 sertifikat
Sensus Barang Milik Daerah	Dilaksanakannya proses sensus Barang Milik Daerah di 49 OPD	49 OPD
Fasilitas Pelayanan Perpajakan	Adanya Wajib Pajak yang membayar pajak PBB-P2	12 bulan
Penyusunan Pokok Ketetapan Pjk Terutang	Terealisasinya dokumen 800.000 SPPT	12 bulan
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	Dilaksanakan distribusi dan penyuluhan SPPT PBB-P2 ke 280 desa	12 bulan
Fasilitas Percepatan Pelunasan PBB-P2	Dilaksanakannya penyerahan hadiah bagi 219 desa dan 6 kecamatan lunas PBB-P2 lbh awal	12 bulan
Layanan Informasi Perpajakan Daerah	Terpasangnya 1 reklame untuk sarana publikasi pajak daerah	12 bulan
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya	Dilaksanakannya koordinasi penatausahaan keuangan dengan 49 OPD	49 OPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Inform.	100%

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Dilaksanakannya penyusunan 2 dok dan sistem informasi terhadap layanan publik	12 bulan
---	---	----------

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.229.771.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.049.500.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 74.000.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.154.890.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 716.115.000,00	APBD
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 9.120.208.100,00	APBD
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 344.500.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 15.688.984.100,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Untuk mengetahui kesimpulan hasil capaian kinerja, digunakan kategori sebagai berikut :

TABEL III.1
KATEGORISASI HASIL KINERJA

No.	Nilai Kinerja	Kategori Hasil Kinerja
1	2	3
1	85 % atau lebih dari rencana	Sangat Berhasil
2	70 % s/d < 85 % dari rencana	Berhasil
3	55 % s/d < 70 % dari rencana	Cukup Berhasil
4	00 % s/d < 55 % dari rencana	Tidak Berhasil

Berdasarkan rumusan dan kategorisasi diatas, maka dapat dilihat hasil pencapaian kinerja organisasi secara obyektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat dikategorikan memperoleh hasil kinerja Sangat Berhasil dengan nilai kinerja lebih besar dari 85% dari rencana. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan Realisasi Pendapatan TA. 2018 sebesar Rp 117.953.970.212,00 lebih besar Rp 21.041.086.278,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp 96.912.883.934,00 dengan kata lain Realisasi Pendapatan dapat tercapai 121,71 persen.

Berikut kami sajikan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL III.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (th)	Target Kinerja Program (tahun)			Realisasi Kinerja Program (tahun)			Perangkat Daerah
			2016	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
a.	Peningkatan PAD	%	12,33	12,33	11,35	24,17	9,70	10,96	- 0,10	BPPKAD
b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*	BPPKAD

* Menunggu hasil audit BPK

Selanjutnya analisis capaian kinerja per sasaran, diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran pertama yaitu Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta kapasitas SDM pengelola, tercapai 100%. Capaian kinerja pada sasaran pertama ini termasuk dalam kategori sangat berhasil, efektif dan efisien. Sasaran pertama tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan di Tahun 2018, yaitu sebagaimana Tabel III.3 berikut:

TABEL III.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama
Meningkatnya Ketepatan dan Kebenaran Pelaporan Keuangan di Masing-Masing Perangkat Daerah

URAIAN	KEGIATAN				Presentase Capaian Kinerja		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana :	Rp	112.000.000	86.060.000	76,84%		
	Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat					Nomor agenda surat, baik surat masuk maupun keluar	Nomor agenda surat, baik surat masuk maupun keluar
	Outcome : Meningkatnya kelancaran pekerjaan					Surat-surat dapat terkirim	Surat-surat dapat terkirim
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana :	Rp	110.000.000	89.440.840	81,31%		
	Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik					Pembayaran telepon, faximile dan internet selama 12 bulan	Pembayaran telepon, faximile dan internet selama 12 bln
	Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja pegawai BPPKAD Kab. Grobogan					Kelancaran komunikasi pelaksanaan tugas melalui telepon, fax dan internet selama 100 bln	Kelancaran komunikasi pelaksanaan tugas melalui telepon, fax dan internet selama 100 bln
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana : Output :	Rp	388.226.000	388.000.000	99.94%		

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI		Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI selama 1 tahun	Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI selama 1 tahun	100,00%
	Outcome : Meningkatnya ketersediaan bidang lahan untuk usaha masyarakat		Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI selama 1 tahun	Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI selama 1 thn	100,00%
	Input : Dana :	Rp	200.000.000	162.543.750	81,27 %
	Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%
	Input : Dana :	Rp	525.000.000	419.166.190	79,84%
	Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Tercapainya kelancaran kerja pegawai		Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	100,00%
	Input : Dana :	Rp	90.000.000	87.747.500	97,50%
	Output : Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Outcome : Meningkatnya kelancaran pekerjaan		Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100,00%
	Input : Dana : Output :	Rp	35.000.000	33.560.000	95,89%

Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor		Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	100,00%
	Outcome : Meningkatkan kenyamanan kerja bagi pegawai		Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana : Output : Tersedianya surat kabar, majalah dan tabloid lainnya	Rp	25.000.000	22.910.000	91,64%
	Outcome : Meningkatnya wawasan bagi pegawai		Tersedianya 15 item surat kabar, majalah dan tabloid selama 12 bln	Tersedianya 15 item surat kabar, majalah dan tabloid selama 12 bln	100,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Input : Dana : Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman kantor	Rp	411.000.000	360.267.500	87,66%
	Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai		Tersedianya makanan dan minuman kantor selama 12 bln	Tersedianya makanan dan minuman kantor selama 12 bln	100,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input : Dana : Output : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp	1.033.545.000	1.023.960.760	99,07%
	Outcome : Meningkatnya kelancaran koordinasi BPPKAD Kab. Grobogan dengan pemerintah		Tersedianya makanan dan minuman kantor selama 12 bln	Tersedianya makanan dan minuman kantor selama 12 bln	100,00%
			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 thn	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah selama 12 thn	100,00%
			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke	100,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPKAD Kab. Grobogan		Dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00%
	Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja bagi pegawai		Dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00%
	Input : Dana :	Rp	100.000.000	99.878.448	99,88%
	Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas	8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai		8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas	8 mobil dinas dan 49 sepeda motor dinas	100,00%
	Input : Dana :	Rp	85.000.000	67.905.000	79,89%
	Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Perawatan peralatan gdg kantor AC, jaringan air bersih,telp, meubelair, APAR, genset	Perawatan peralatan gdg kantor AC, jaringan air bersih,telp, meubelair, APAR, genset	100,00%
	Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai		Perawatan peralatan gdg kantor AC, jaringan air bersih,telp, meubelair, APAR, genset	Perawatan peralatan gdg kantor AC, jaringan air bersih,telp, meubelair, APAR, genset	100,00%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana :	Rp	74.000.000	57.865.000	78,20%
	Output : Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		210 pakaian	210 pakaian	100,00%
	Outcome : Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu		210 pakaian	210 pakaian	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana : Output :	Rp	200.000.000	199.453.610	99,73%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		Dilaksanakannya diklat, bimtek, sosialisasi, selama 12 bln	Dilaksanakannya diklat, bimtek, sosialisasi, selama 12 bln	100,00%
	Outcome : Meningkatnya kualitas SDM BPPKAD Kab. Grobogan		Dilaksanakannya diklat, bimtek, sosialisasi, selama 12 bln	Dilaksanakannya diklat, bimtek, sosialisasi, selama 12 bln	100,00%
	Input : Dana :	Rp	70.000.000	69.823.750	99,75%
	Output : Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak		Dilaksanakannya sosialisasi perub. Perda No. 6 th 2010 di 100 WP	Dilaksanakannya sosialisasi perub. Perda No. 6 th 2010 di 100 WP	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terlaksananya sosialisasi perubahan Perda No. 6 tahun 2010		Dilaksanakannya sosialisasi perub. Perda No. 6 th 2010 di 100 WP	Dilaksanakannya sosialisasi perub. Perda No. 6 th 2010 di 100 WP	100,00%
	Input : Dana :	Rp	509.890.000	455.769.037	89,39%
	Output : Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja melalui Simda Perencanaan		Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 120 orang	Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 120 orang	100,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kemampuan OPD dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja melalui Simda Perencanaan		Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 120 orang	Dilaksanakannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 120 orang	100,00%
	Input : Dana :	Rp	260.000.000	242.445.000	93,25%
	Output : Terlaksanakannya Pembekalan Penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD		Dilaks. Pembekalan penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD	Dilaks. Pembekalan penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD	100,00%
	Outcome :				

	Meningkatnya kualitas SDM pegawai BPPKAD tentang penatausahaan keuangan		Dilaks. Pembekalan penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD	Dilaks. Pembekalan penatausahaan keuangan bagi pegawai BPPKAD	100,00%
--	---	--	---	---	---------

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja sasaran kedua yaitu Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 100%. Capaian kinerja pada sasaran kedua ini termasuk dalam kategori sangat berhasil. Sasaran kedua tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan di Tahun 2018, yaitu sebagaimana Tabel III.4 berikut:

TABEL III.4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kedua
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

URAIAN	KEGIATAN				Presentase Capaian Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana :	Rp	369.000.000	209.236.500	56,70%
	Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja BPPKAD		Dilaksanakannya cetak buku PK,IK, RKA, DPA-P,LkjIP, LPPD dan LKPJ 16 dok	Dilaksanakannya cetak buku PK,IK, RKA, DPA-P,LkjIP, LPPD dan LKPJ 16 dok	100,00%
	Outcome : Meningkatnya kelancaran administrasi BPPKAD		Dilaksanakannya cetak buku PK,IK, RKA, DPA-P,LkjIP, LPPD dan LKPJ 12 bulan	Dilaksanakannya cetak buku PK,IK, RKA, DPA-P,LkjIP, LPPD dan LKPJ 12 bulan	100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Input : Dana :	Rp	82.220.000	80.330.000	97,70%
	Output : Triwulan dan Semesteran APBD Pem. Kab. Grobogan		720 buku	720 buku	100,00%
	Outcome :				

	Terwujudnya penyusunan realisasi triwulanan dan realisasi semester APBD Kab. Grobogan TA. 2018		720 buku	720 buku	100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input :				
	Dana :	Rp	264.895.000	242.390.000	91,50%
	Output :				
	Tersusunnya Buku Lap Keu Pemerintah Desa		190 buku	190 buku	100,00%
Penyusunan Analisis Standar Belanja	Outcome :				
	Tersedianya Buku Lap Keu Pemerintah Daerah		190 buku	190 buku	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	125.000.000	112.085.000	89,67%
Penyusunan Raperda tentang APBD	Output :				
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang ASB		Tersusunnya 5 ASB	Tersusunnya 5 ASB	100,00%
	Outcome :				
	Tersedianya dokumen ASB		Tersusunnya 5 ASB	Tersusunnya 5 ASB	100,00%
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2017	Input :				
	Dana :	Rp	289.125.000	275.520.000	95,29%
	Output :				
	Tersusunnya Raperda tentang APBD TA. 2019		120 buku	120 buku	100,00%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Outcome :				
	Tersedianya Raperda tentang APBD TA. 2019		120 buku	120 buku	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	308.550.000	298.662.250	96,80%
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Output :				
	Tersusunnya Raperbup tentang Penjabaran APBD TA. 2019		120 buku	120 buku	100,00%
	Outcome :				
	Tersedianya dokumen Raperbup ttg Penjabaran APBD TA. 2019		120 buku	120 buku	100,00%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Input :				
	Dana :	Rp	380.310.000	291.460.000	76,64%
	Output :				
	Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2018		120 buku	120 buku	100,00%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Outcome :				
	Tersedianya dokumen Raperda ttg Perubahan APBD TA. 2018		120 buku	120 buku	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	324.515.000	298.583.500	92,01%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Output :				
	Tersusunnya Raperbup ttg		120 buku	120 buku	100,00%

Perubahan APBD	Penjabaran Perub APBD TA. 2018 Outcome : Tersedianya dokumen Raperbup ttg Penjabaran Perub APBD TA. 2018		120 buku	120 buku	100,00%
Penyusunan Raperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaks. APBD	Input : Dana : Output : Terlaksananya Penyusunan Raperda ttg Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	Rp	369.904.000	353.848.900	95,66%
	Outcome : Tersedianya dokumen Raperda ttg Pertanggung jawaban APBD TA. 2017		150 buku	150 buku	100,00%
Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	Input : Dana : Output : Terlaksananya Penyusunan Raperbup ttg Penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	Rp	352.340.000	338.330.000	96,02%
	Outcome : Tersedianya dokumen Raperbup ttg Penjabaran pertanggungjawaban Pelaks APBD TA. 2017		160 buku	160 buku	100,00%
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)	Input : Dana : Output : Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	Rp	551.246.000	403.643.560	73,22%
	Outcome : Meningkatnya kelancaran pengelolaan keuangan daerah		12 bulan	12 bulan	100,00%
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana : Output : Terlaksananya Bimtek Penyus APBD TA. 2019	Rp	117.500.000	113.326.600	96,45%
	Outcome : Meningkatnya pemahaman ketentuan penyus APBD TA. 2019		100 orang	100 orang	100,00%
Bimtek Implementasi Paket Regulasi	Input : Dana : Output :	Rp	292.651.000	234.806.500	80,23%

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Bimtek Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuda Outcome :		165 orang	165 orang	100,00%
	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi penyusunan laporan keuangan Input :		165 orang	165 orang	100,00%
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Dana :	Rp	430.257.000	362.535.450	84,26%
	Output : Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang daerah Outcome :		49 OPD	49 OPD	100,00%
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah bagi pengurus barang Input :		49 OPD	49 OPD	100,00%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Dana :	Rp	120.000.000	99.561.139	82,97%
	Output : Teridentifikasi Analisis Investasi Outcome :		6 BUMD	6 BUMD	100,00%
	Terhitungnya kebutuhan investasi secara layak Input :		6 BUMD	6 BUMD	100,00%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dana :	Rp	380.000.000	365.050.000	96,07%
	Output : Terlaksananya intensifikasi dan eksistensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Outcome :		280 desa	280 desa	100,00%
	Meningkatnya penerimaan PBB-P2 Input :		12 bulan	12 bulan	100,00%
Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dana :	Rp	422.198.100	344.726.300	81,65%
	Output : Tersusunnya penyusunan Perbup TPP, Bankeu, Hibah dan Bansos, Kebijakan Akuntansi BLUD, Pedoman Penghapusan Piutang Daerah, Penilaian Kinerja BLUD, Tambahan Penghasilan 2019 Outcome :		7 Perbup	7 Perbup	100,00%
	Meningkatnya tertib adm pengelolaan data		7 Perbup	7 Perbup	100,00%

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Input : Dana : Output : Terlaksananya kegiatan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah Outcome : Meningkatnya ketertiban wajib pajak utk membayar pajak tepat waktu	Rp	860.500.000	779.113.750	90,54%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
Penatausahaan Belanja PPKD	Input : Dana : Output : Terlaksananya penatausahaan belanja bunga, bagi hasil, bantuan keuangan, penatausahaan belanja hibah, belanja bansos dan belanja tak terduga Outcome : Meningkatnya kelancaran penatausahaan belanja bunga, bagi hasil, bantuan keu, penatausahaan belanja hibah, belanja bansos dan belanja tak terduga	Rp	540.800.000	533.674.900	98,68%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input : Dana : Output : Terlaksananya Monev pengelolaan dana transfer ke daerah Outcome : Meningkatnya kelancaran dana transfer ke daerah 12 bln	Rp	454.769.000	454.034.800	99,84%
			50 OPD	50 OPD	100,00%
			50 OPD	50 OPD	100,00%
Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Lainnya	Input : Dana : Output : Terlaksananya integrasi SIMDA keuangan dan SIMDA Pendapatan Outcome : Meningkatnya data integrasi SIMDA Keu dan SIMDA Pendapatan	Rp	94.500.000	94.499.656	100,00%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
			12 bulan	12 bulan	100,00%
Penataan Penguasaan, Pemilikan,	Input : Dana : Output :	Rp	247.500.000	207.708.250	83,92%

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya pensertifikatan tanah milik Pem. Kab.Grobogan		64 sertifikat	64 sertifikat	100,00%
	Outcome : Tersedianya dokumen sertifikat tanah milik pemkab. Grobogan		64 sertifikat	64 sertifikat	100,00%
Sensus Barang Milik Daerah	Input :				
	Dana :	Rp	1.084.702.000	983.086.200	90,63%
	Output : Terdatanya BMD		49 OPD	49 OPD	100,00%
Fasilitasi Pelayanan Perpajakan	Outcome : Tersedianya data BMD		49 OPD	49 OPD	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	291.000.000	281.640.500	96,78%
	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi PBB-P2		5000 wp dan 280 desa	5000 wp dan 280 desa	100,00%
Penyusunan Pokok Ketetapan Pajak Terutang	Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm membayar PBB-P2		12 bulan	12 bulan	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	358.000.000	348.622.300	97,38%
	Output : Tersusunnya dokumen penertiban SPPT PBB-P2		800000 SPPT	800000 SPPT	100,00%
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm membayar PBB-P2		12 bulan	12 bulan	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	75.000.000	72.340.000	96,45%
Fasilitasi Percepatan Pelunasan PBB-P2	Output : Terlaksananya distribusi & penyuluhan SPPT PBB-P2		280 desa	280 desa	100,00%
	Outcome : Meningkatnya desa dan kecamatan yang membayar lunas PBB lebih awal		12 bulan	12 bulan	100,00%
	Input :				
	Dana :	Rp	468.500.000	417.685.050	89,15%
	Output : Terlaksananya penyerahan hadiah bagi desa dan kec lunas PBB-P2 lebih awal		219 desa dan 6 kecamatan	219 desa dan 6 kecamatan	100,00%
	Outcome : Meningkatnya desa dan kec yang membayar lunas PBB lebih awal		12 bulan	12 bulan	100,00%

Layanan Informasi Perpajakan Daerah	Input :				
	Dana :	Rp	105.000.000	103.665.000	98,73%
	Output :				
	Terlaksananya pemasangan sarana publikasi pajak daerah		1 reklame	1 reklame	100,00%
	Outcome :				
	Tersampainya informasi pajak daerah		12 bulan	12 bulan	100,00%
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Input :				
	Dana :	Rp	76.341.000	69.807.500	91,44%
	Output :				
	Terlaksananya koordinasi penata-usahaan keuangan dengan instansi terkait		49 OPD	49 OPD	100,00%
	Outcome :				
	Kelancaran koord penata-usahaan keuangan dengan instansi terkait		49 OPD	49 OPD	100,00%
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Input :				
	Dana :	Rp	344.500.000	343.345.000	99,66%
	Output :				
	Tersusunnya dok dan sistem informasi trhadap layanan publik		2 dokumen	2 dokumen	100,00%
	Outcome :				
	Meningkatnya basis data subyek obyek pajak yang lebih baik		12 bulan	12 bulan	100,00%

B. REALISASI ANGGARAN

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp 117.953.970.212,00 lebih besar Rp 21.041.086.278,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp 96.912.883.934,00 atau tercapai 121,71 persen.
2. Realisasi Belanja sebesar Rp 24.710.418.663,00 lebih kecil Rp 1.901.643.033,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp 26.612.061.696,00 atau tercapai 92,85 persen.
3. Pada realisasi APBD tahun anggaran 2018 terjadi surplus sebesar Rp 93.243.551.549,00; dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 93.243.551.549,00
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	96,912,883,934.00	117,953,970,212.00	21,041,086,278.00
Belanja dan Transfer	26,612,061,696.00	24,710,418,663.00	(1,901,643,033.00)
Surplus/(Defisit)	70,300,822,238.00	93,243,551,549.00	22,942,729,311.00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	70,300,822,238.00	93,243,551,549.00	22,942,729,311.00

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA TA 2018 berasal dari *over target* Pendapatan sebesar Rp 21.041.086.278,00 atau 21,71 persen; Belanja lebih kecil sebesar Rp 1.901.643.033,00 atau 7,15 persen; dan dari surplus Pembiayaan Netto sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017

Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 118.028.341,00 atau minus 0,010 persen. Realisasi PAD TA 2017 adalah sebesar Rp 118.071.998.553,00 sedangkan Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp 117.953.970.212,00. Belanja Tahun Anggaran 2018 meningkat sebesar Rp 126.512.817,00 atau 0,51 persen, sedangkan SILPA menurun Rp 244.541.158,00 atau 0,26 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

	Realisasi		Realisasi 2018 - Realisasi 2017	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Rp	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	117,953,970,212.00	118,071,998,553.00	(118,028,341.00)	(0.10)
Belanja dan Transfer	24,710,418,663.00	24,583,905,846.00	126,512,817.00	0.51
Surplus/(Defisit)	93,243,551,549.00	93,488,092,707.00	(244,541,158.00)	(0.26)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	93,243,551,549.00	93,488,092,707.00	(244,541,158.00)	(0.26)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 4.04	Urusan Penunjang / Pemerintahan Keuangan				
Unit Organisasi	: 4.04.05	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				
Sub Unit Organisasi	: 4.04.05.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (OPD)				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	96,912,883,934.00	117,953,970,212.00	21,041,086,278.00	121.71	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	96,912,883,934.00	117,953,970,212.00	21,041,086,278.00	121.71	
4.1.00.00.1	Pendapatan Pajak Daerah	67,170,000,000.00	77,019,506,176.00	9,849,506,176.00	114.66	
4.1.00.00.1.01	Pajak Hotel	300,000,000.00	400,443,825.00	100,443,825.00	133.48	
4.1.00.00.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	0.00	27,934,126.00	27,934,126.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.05	Hotel Bintang Dua	0.00	50,761,125.00	50,761,125.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.06	Hotel Bintang Satu	0.00	18,942,250.00	18,942,250.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.07	Hotel Melati Tiga	0.00	15,452,365.00	15,452,365.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.08	Hotel Melati Dua	0.00	13,376,700.00	13,376,700.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.09	Hotel Melati Satu	300,000,000.00	216,688,759.00	(83,311,241.00)	72.23	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	0.00	57,288,500.00	57,288,500.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.02	Pajak Restoran	2,550,000,000.00	3,688,014,187.00	1,138,014,187.00	144.63	
4.1.00.00.1.02.02	Rumah Makan	550,000,000.00	771,609,371.00	221,609,371.00	140.29	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.02.05	Katering	2,000,000,000.00	2,916,404,816.00	916,404,816.00	145.82	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03	Pajak Hiburan	147,000,000.00	212,472,027.00	65,472,027.00	144.54	
4.1.00.00.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	0.00	4,287,500.00	4,287,500.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03.15	Permainan Ketangkasan	112,000,000.00	180,505,927.00	68,505,927.00	161.17	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03.19	Pertandingan Olahraga	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.03.20	Pertunjukan (Pertunjukan Insidental)	35,000,000.00	23,278,600.00	(11,721,400.00)	66.51	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.04	Pajak Reklame	350,000,000.00	579,087,920.00	229,087,920.00	165.45	
4.1.00.00.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	278,000,000.00	482,296,170.00	204,296,170.00	173.49	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.04.02	Reklame Kain	72,000,000.00	90,745,000.00	18,745,000.00	126.03	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.04.05	Reklame Berjalan	0.00	6,046,750.00	6,046,750.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.05	Pajak Penerangan Jalan	31,000,000,000.00	34,955,830,842.00	3,955,830,842.00	112.76	
4.1.00.00.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	31,000,000,000.00	34,955,830,842.00	3,955,830,842.00	112.76	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.07	Pajak Parkir	123,000,000.00	158,311,750.00	35,311,750.00	128.71	
4.1.00.00.1.07.01	Pajak Parkir	123,000,000.00	158,311,750.00	35,311,750.00	128.71	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	140,000,000.00	350,495,166.00	210,495,166.00	250.35	
4.1.00.00.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	140,000,000.00	350,495,166.00	210,495,166.00	250.35	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	56,609,000.00	21,609,000.00	161.74	
4.1.00.00.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	56,609,000.00	21,609,000.00	161.74	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25,000,000.00	76,214,300.00	51,214,300.00	304.86	
4.1.00.00.1.10.04	Batu Kapur	0.00	2,366,700.00	2,366,700.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.10.06	Pajak Golongan C Insidental	25,000,000.00	2,022,000.00	(22,978,000.00)	8.09	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.10.08	Tanah Sorap/Urug	0.00	71,471,040.00	71,471,040.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.10.09	Pasir Kuarsa/Koral	0.00	354,560.00	354,560.00	0.00	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25,000,000,000.00	25,811,222,907.00	811,222,907.00	103.24	
4.1.00.00.1.11.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25,000,000,000.00	25,811,222,907.00	811,222,907.00	103.24	Perda No. 14 Tahun 2016

4.1.00.00.1.12		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,500,000,000.00	10,730,804,252.00	3,230,804,252.00	143.08	
4.1.00.00.1.12.01		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,500,000,000.00	10,730,804,252.00	3,230,804,252.00	143.08	Perda No. 14 Tahun 2016
4.1.00.00.2		Hasil Retribusi Daerah	98,089,700.00	92,528,880.00	(5,560,820.00)	94.33	
4.1.00.00.2.02		Retribusi Jasa Usaha	98,089,700.00	57,875,280.00	(40,214,420.00)	59.00	
4.1.00.00.2.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98,089,700.00	57,875,280.00	(40,214,420.00)	59.00	Perda No. 12 Tahun 2016
4.1.00.00.2.03		Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	34,653,600.00	34,653,600.00	0.00	
4.1.00.00.2.03.15		Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	0.00	34,653,600.00	34,653,600.00	0.00	Perda No. 13 Tahun 2016
4.1.00.00.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,543,791,034.00	17,538,714,445.00	(5,076,589.00)	99.97	
4.1.00.00.3.01		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17,543,791,034.00	17,538,714,445.00	(5,076,589.00)	99.97	
4.1.00.00.3.01.01		Perusahaan Daerah Purwa Aksara	312,877,650.00	312,877,650.00	0.00	100.00	
4.1.00.00.3.01.02		Perusda BPR Purwa Artha	1,100,669,880.00	1,100,669,880.00	0.00	100.00	
4.1.00.00.3.01.03		Bank Kredit Kecamatan	5,503,471,231.00	5,503,471,231.00	0.00	100.00	
4.1.00.00.3.01.05		Pendapatan Deviden Saham Bank BPD	10,621,695,684.00	10,621,695,684.00	0.00	100.00	
4.1.00.00.3.01.08		PT. Jamkrida Jateng	5,076,589.00	0.00	(5,076,589.00)	0.00	
4.1.00.00.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,101,003,200.00	23,303,220,711.00	11,202,217,511.00	192.57	
4.1.00.00.4.01		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	101,003,200.00	339,178,546.00	238,175,346.00	335.81	
4.1.00.00.4.01.02		Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0.00	10,490,150.00	10,490,150.00	0.00	
4.1.00.00.4.01.03		Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0.00	7,825,000.00	7,825,000.00	0.00	
4.1.00.00.4.01.05		Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0.00	89,232,596.00	89,232,596.00	0.00	
4.1.00.00.4.01.06		Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.00.00.4.01.10		Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100,000,000.00	153,283,600.00	53,283,600.00	153.28	
4.1.00.00.4.01.21		Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten	1,003,200.00	78,347,200.00	77,344,000.00	7,809.73	
4.1.00.00.4.02		Penerimaan Jasa Giro	3,000,000,000.00	2,642,154,601.00	(357,845,399.00)	88.07	
4.1.00.00.4.02.01		Jasa Giro Kas Daerah	3,000,000,000.00	2,642,154,601.00	(357,845,399.00)	88.07	
4.1.00.00.4.03		Penerimaan Bunga Deposito	9,000,000,000.00	13,468,664,336.00	4,468,664,336.00	149.65	
4.1.00.00.4.03.01		Rekening Deposito Pada Bank Jateng	9,000,000,000.00	13,468,664,336.00	4,468,664,336.00	149.65	
4.1.00.00.4.04		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
4.1.00.00.4.04.01		Kerugian Uang Daerah	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
4.1.00.00.4.07		Pendapatan Denda Pajak	0.00	411,812,191.00	411,812,191.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.01		Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	593,351.00	593,351.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.02		Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	2,973,940.00	2,973,940.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.03		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	93,879.00	93,879.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.04		Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	613,980.00	613,980.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.07		Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00	160,860.00	160,860.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.08		Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0.00	19,136,609.00	19,136,609.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.10		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	738,499.00	738,499.00	0.00	
4.1.00.00.4.07.11		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.00	387,501,073.00	387,501,073.00	0.00	
4.1.00.00.4.10		Pendapatan Dari Pengembalian	0.00	6,438,411,037.00	6,438,411,037.00	0.00	
4.1.00.00.4.10.07		Taspen	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	
4.1.00.00.4.10.09		Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya	0.00	6,421,511,037.00	6,421,511,037.00	0.00	
5		BELANJA	26,612,061,696.00	24,710,418,663.00	(1,901,643,033.00)	92.85	
5.1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,923,077,596.00	10,499,136,923.00	(423,940,673.00)	96.12	
5.1.00.00.1		Belanja Pegawai	10,923,077,596.00	10,499,136,923.00	(423,940,673.00)	96.12	
5.1.00.00.1.01		Gaji Dan Tunjangan	5,244,973,111.00	5,024,734,423.00	(220,238,688.00)	95.80	
5.1.00.00.1.01.01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,002,410,725.00	3,881,173,819.00	(121,236,906.00)	96.97	
5.1.00.00.1.01.02		Tunjangan Keluarga	376,613,283.00	368,915,135.00	(7,698,148.00)	97.96	
5.1.00.00.1.01.03		Tunjangan Jabatan	288,720,000.00	284,060,000.00	(4,660,000.00)	98.39	
5.1.00.00.1.01.05		Tunjangan Fungsional Umum	139,405,000.00	136,675,000.00	(2,730,000.00)	98.04	
5.1.00.00.1.01.06		Tunjangan Beras	242,607,000.00	205,238,280.00	(37,368,720.00)	84.60	
5.1.00.00.1.01.07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00	

5.1.00.00.1.01.08		Pembulatan Gaji	53,521.00	52,092.00	(1,429.00)	97.33
5.1.00.00.1.01.09		Iuran Asuransi Kesehatan	157,289,863.00	109,141,063.00	(48,148,800.00)	69.39
5.1.00.00.1.01.21		Asuransi Ketenagakerjaan	35,873,719.00	39,479,034.00	3,605,315.00	110.05
5.1.00.00.1.02		Tambahan Penghasilan PNS	2,314,700,000.00	2,246,340,000.00	(68,360,000.00)	97.05
5.1.00.00.1.02.01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,273,900,000.00	2,202,340,000.00	(71,560,000.00)	96.85
5.1.00.00.1.02.04		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	40,800,000.00	44,000,000.00	3,200,000.00	107.84
5.1.00.00.1.05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3,358,500,000.00	3,228,062,500.00	(130,437,500.00)	96.12
5.1.00.00.1.05.06		Insentif Pemungutan Pajak Hotel - LRA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.07		Insentif Pemungutan Pajak Restoran - LRA	127,500,000.00	127,500,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.08		Insentif Pemungutan Pajak Hiburan - LRA	7,350,000.00	6,912,500.00	(437,500.00)	94.05
5.1.00.00.1.05.09		Insentif Pemungutan Pajak Reklame - LRA	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.10		Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan - LRA	1,550,000,000.00	1,470,000,000.00	(80,000,000.00)	94.84
5.1.00.00.1.05.11		Insentif Pemungutan Pajak Parkir - LRA	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.12		Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah - LRA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.13		Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.14		Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.05.15		Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1,250,000,000.00	1,200,000,000.00	(50,000,000.00)	96.00
5.1.00.00.1.05.16		Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	375,000,000.00	375,000,000.00	0.00	100.00
5.1.00.00.1.06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4,904,485.00	0.00	(4,904,485.00)	0.00
5.1.00.00.1.06.15		Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	4,904,485.00	0.00	(4,904,485.00)	0.00
5.2		BELANJA LANGSUNG	15,688,984,100.00	14,211,281,740.00	(1,477,702,360.00)	90.58
5.2.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,229,771,000.00	2,946,468,290.00	(283,302,710.00)	91.23
5.2.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112,000,000.00	86,060,000.00	(25,940,000.00)	76.84
5.2.01.01.1		Belanja Pegawai	60,000,000.00	56,100,000.00	(3,900,000.00)	93.50
5.2.01.01.2		Belanja Barang dan Jasa	52,000,000.00	29,960,000.00	(22,040,000.00)	57.62
5.2.01.01.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000.00	89,440,840.00	(20,559,160.00)	81.31
5.2.01.02.1		Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.02.2		Belanja Barang dan Jasa	110,000,000.00	89,440,840.00	(20,559,160.00)	81.31
5.2.01.02.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	388,226,000.00	388,000,000.00	(226,000.00)	99.94
5.2.01.07.1		Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.07.2		Belanja Barang dan Jasa	388,226,000.00	388,000,000.00	(226,000.00)	99.94
5.2.01.07.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200,000,000.00	162,543,750.00	(37,456,250.00)	81.27
5.2.01.08.1		Belanja Pegawai	135,935,000.00	100,628,750.00	(35,306,250.00)	74.03
5.2.01.08.2		Belanja Barang dan Jasa	64,065,000.00	61,915,000.00	(2,150,000.00)	96.64
5.2.01.08.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	525,000,000.00	419,166,190.00	(105,833,810.00)	79.84
5.2.01.10.1		Belanja Pegawai	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	100.00
5.2.01.10.2		Belanja Barang dan Jasa	523,240,000.00	417,406,190.00	(105,833,810.00)	79.77
5.2.01.10.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,000,000.00	87,747,500.00	(2,252,500.00)	97.50
5.2.01.11.1		Belanja Pegawai	660,000.00	660,000.00	0.00	100.00
5.2.01.11.2		Belanja Barang dan Jasa	89,340,000.00	87,087,500.00	(2,252,500.00)	97.48
5.2.01.11.3		Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,000,000.00	33,560,000.00	(1,440,000.00)	95.89
5.2.01.12.1		Belanja Pegawai	2,400,000.00	960,000.00	(1,440,000.00)	40.00
5.2.01.12.2		Belanja Barang dan Jasa	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	100.00
5.2.01.12.3		Belanja Modal	-	-	-	-

5.2.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000.00	22,910,000.00	(2,090,000.00)	91.64
5.2.01.15.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.15.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	22,910,000.00	(2,090,000.00)	91.64
5.2.01.15.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	411,000,000.00	360,267,500.00	(50,732,500.00)	87.66
5.2.01.17.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.17.2	Belanja Barang dan Jasa	411,000,000.00	360,267,500.00	(50,732,500.00)	87.66
5.2.01.17.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,033,545,000.00	1,023,960,760.00	(9,584,240.00)	99.07
5.2.01.18.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.18.2	Belanja Barang dan Jasa	1,033,545,000.00	1,023,960,760.00	(9,584,240.00)	99.07
5.2.01.18.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.79	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	85,000,000.00	73,675,000.00	(11,325,000.00)	86.68
5.2.01.79.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.01.79.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	73,675,000.00	(11,325,000.00)	86.68
5.2.01.79.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.01.80	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	215,000,000.00	199,136,750.00	(15,863,250.00)	92.62
5.2.01.80.1	Belanja Pegawai	31,980,000.00	19,973,750.00	(12,006,250.00)	62.46
5.2.01.80.2	Belanja Barang dan Jasa	183,020,000.00	179,163,000.00	(3,857,000.00)	97.89
5.2.01.80.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,049,500,000.00	1,019,153,448.00	(30,346,552.00)	97.11
5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	275,000,000.00	268,400,000.00	(6,600,000.00)	97.60
5.2.02.22.1	Belanja Pegawai	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	100.00
5.2.02.22.2	Belanja Barang dan Jasa	272,160,000.00	265,560,000.00	(6,600,000.00)	97.57
5.2.02.22.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,000,000.00	99,878,448.00	(121,552.00)	99.88
5.2.02.24.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.02.24.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	99,878,448.00	(121,552.00)	99.88
5.2.02.24.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85,000,000.00	67,905,000.00	(17,095,000.00)	79.89
5.2.02.28.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.02.28.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	67,905,000.00	(17,095,000.00)	79.89
5.2.02.28.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.02.74	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPPKAD	589,500,000.00	582,970,000.00	(6,530,000.00)	98.89
5.2.02.74.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.02.74.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
5.2.02.74.3	Belanja Modal	589,500,000.00	582,970,000.00	(6,530,000.00)	98.89
5.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	74,000,000.00	57,865,000.00	(16,135,000.00)	78.20
5.2.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	74,000,000.00	57,865,000.00	(16,135,000.00)	78.20
5.2.03.05.1	Belanja Pegawai	660,000.00	660,000.00	0.00	100.00
5.2.03.05.2	Belanja Barang dan Jasa	73,340,000.00	57,205,000.00	(16,135,000.00)	78.00
5.2.03.05.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,154,890,000.00	1,074,476,397.00	(80,413,603.00)	93.04
5.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	200,000,000.00	199,453,610.00	(546,390.00)	99.73
5.2.05.01.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.05.01.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	199,453,610.00	(546,390.00)	99.73
5.2.05.01.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	70,000,000.00	69,823,750.00	(176,250.00)	99.75
5.2.05.02.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.05.02.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000.00	69,823,750.00	(176,250.00)	99.75
5.2.05.02.3	Belanja Modal	-	-	-	-

5.2.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	115,000,000.00	106,985,000.00	(8,015,000.00)	93.03
5.2.05.03.1	Belanja Pegawai	715,000.00	660,000.00	(55,000.00)	92.31
5.2.05.03.2	Belanja Barang dan Jasa	114,285,000.00	106,325,000.00	(7,960,000.00)	93.03
5.2.05.03.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.05.53	Bimbingan teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	509,890,000.00	455,769,037.00	(54,120,963.00)	89.39
5.2.05.53.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.05.53.2	Belanja Barang dan Jasa	509,890,000.00	455,769,037.00	(54,120,963.00)	89.39
5.2.05.53.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.05.55	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	260,000,000.00	242,445,000.00	(17,555,000.00)	93.25
5.2.05.55.1	Belanja Pegawai	660,000.00	660,000.00	0.00	100.00
5.2.05.55.2	Belanja Barang dan Jasa	259,340,000.00	241,785,000.00	(17,555,000.00)	93.23
5.2.05.55.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	716,115,000.00	531,956,500.00	(184,158,500.00)	74.28
5.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	369,000,000.00	209,236,500.00	(159,763,500.00)	56.70
5.2.06.01.1	Belanja Pegawai	22,500,000.00	21,856,250.00	(643,750.00)	97.14
5.2.06.01.2	Belanja Barang dan Jasa	346,500,000.00	187,380,250.00	(159,119,750.00)	54.08
5.2.06.01.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	82,220,000.00	80,330,000.00	(1,890,000.00)	97.70
5.2.06.02.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.06.02.2	Belanja Barang dan Jasa	82,220,000.00	80,330,000.00	(1,890,000.00)	97.70
5.2.06.02.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	264,895,000.00	242,390,000.00	(22,505,000.00)	91.50
5.2.06.04.1	Belanja Pegawai	126,420,000.00	126,270,000.00	(150,000.00)	99.88
5.2.06.04.2	Belanja Barang dan Jasa	138,475,000.00	116,120,000.00	(22,355,000.00)	83.86
5.2.06.04.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9,120,208,100.00	8,238,017,105.00	(882,190,995.00)	90.33
5.2.17.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	125,000,000.00	112,085,000.00	(12,915,000.00)	89.67
5.2.17.01.1	Belanja Pegawai	85,600,000.00	73,900,000.00	(11,700,000.00)	86.33
5.2.17.01.2	Belanja Barang dan Jasa	39,400,000.00	38,185,000.00	(1,215,000.00)	96.92
5.2.17.01.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	289,125,000.00	275,520,000.00	(13,605,000.00)	95.29
5.2.17.06.1	Belanja Pegawai	207,620,000.00	200,420,000.00	(7,200,000.00)	96.53
5.2.17.06.2	Belanja Barang dan Jasa	81,505,000.00	75,100,000.00	(6,405,000.00)	92.14
5.2.17.06.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	308,550,000.00	298,662,250.00	(9,887,750.00)	96.80
5.2.17.07.1	Belanja Pegawai	218,020,000.00	208,201,250.00	(9,818,750.00)	95.50
5.2.17.07.2	Belanja Barang dan Jasa	90,530,000.00	90,461,000.00	(69,000.00)	99.92
5.2.17.07.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	380,310,000.00	291,460,000.00	(88,850,000.00)	76.64
5.2.17.08.1	Belanja Pegawai	208,240,000.00	195,320,000.00	(12,920,000.00)	93.80
5.2.17.08.2	Belanja Barang dan Jasa	172,070,000.00	96,140,000.00	(75,930,000.00)	55.87
5.2.17.08.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	324,515,000.00	298,583,500.00	(25,931,500.00)	92.01
5.2.17.09.1	Belanja Pegawai	218,240,000.00	200,832,500.00	(17,407,500.00)	92.02
5.2.17.09.2	Belanja Barang dan Jasa	106,275,000.00	97,751,000.00	(8,524,000.00)	91.98
5.2.17.09.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	369,904,000.00	353,848,900.00	(16,055,100.00)	95.66
5.2.17.10.1	Belanja Pegawai	182,520,000.00	177,720,000.00	(4,800,000.00)	97.37
5.2.17.10.2	Belanja Barang dan Jasa	187,384,000.00	176,128,900.00	(11,255,100.00)	93.99
5.2.17.10.3	Belanja Modal	-	-	-	-

5.2.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	352,340,000.00	338,330,000.00	(14,010,000.00)	96.02
5.2.17.11.1	Belanja Pegawai	106,320,000.00	106,320,000.00	0.00	100.00
5.2.17.11.2	Belanja Barang dan Jasa	246,020,000.00	232,010,000.00	(14,010,000.00)	94.31
5.2.17.11.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.13	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)	551,246,000.00	403,643,560.00	(147,602,440.00)	73.22
5.2.17.13.1	Belanja Pegawai	303,230,000.00	270,623,750.00	(32,606,250.00)	89.25
5.2.17.13.2	Belanja Barang dan Jasa	248,016,000.00	133,019,810.00	(114,996,190.00)	53.63
5.2.17.13.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	117,500,000.00	113,326,600.00	(4,173,400.00)	96.45
5.2.17.14.1	Belanja Pegawai	715,000.00	660,000.00	(55,000.00)	92.31
5.2.17.14.2	Belanja Barang dan Jasa	116,785,000.00	112,666,600.00	(4,118,400.00)	96.47
5.2.17.14.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	292,651,000.00	234,806,500.00	(57,844,500.00)	80.23
5.2.17.15.1	Belanja Pegawai	1,320,000.00	660,000.00	(660,000.00)	50.00
5.2.17.15.2	Belanja Barang dan Jasa	291,331,000.00	234,146,500.00	(57,184,500.00)	80.37
5.2.17.15.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	430,257,000.00	362,535,450.00	(67,721,550.00)	84.26
5.2.17.16.1	Belanja Pegawai	145,660,000.00	144,545,000.00	(1,115,000.00)	99.23
5.2.17.16.2	Belanja Barang dan Jasa	284,597,000.00	217,990,450.00	(66,606,550.00)	76.60
5.2.17.16.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah	120,000,000.00	99,561,139.00	(20,438,861.00)	82.97
5.2.17.17.1	Belanja Pegawai	63,200,000.00	48,450,000.00	(14,750,000.00)	76.66
5.2.17.17.2	Belanja Barang dan Jasa	56,800,000.00	51,111,139.00	(5,688,861.00)	89.98
5.2.17.17.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	380,000,000.00	365,050,000.00	(14,950,000.00)	96.07
5.2.17.19.1	Belanja Pegawai	84,661,000.00	84,661,000.00	0.00	100.00
5.2.17.19.2	Belanja Barang dan Jasa	295,339,000.00	280,389,000.00	(14,950,000.00)	94.94
5.2.17.19.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.146	Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	422,198,100.00	344,726,300.00	(77,471,800.00)	81.65
5.2.17.146.1	Belanja Pegawai	229,550,000.00	189,650,000.00	(39,900,000.00)	82.62
5.2.17.146.2	Belanja Barang dan Jasa	192,648,100.00	155,076,300.00	(37,571,800.00)	80.50
5.2.17.146.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.147	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	860,500,000.00	779,113,750.00	(81,386,250.00)	90.54
5.2.17.147.1	Belanja Pegawai	340,965,000.00	265,371,250.00	(75,593,750.00)	77.83
5.2.17.147.2	Belanja Barang dan Jasa	519,535,000.00	513,742,500.00	(5,792,500.00)	98.89
5.2.17.147.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.148	Penatausahaan Belanja PPKD	540,800,000.00	533,674,900.00	(7,125,100.00)	98.68
5.2.17.148.1	Belanja Pegawai	526,350,000.00	519,225,000.00	(7,125,000.00)	98.65
5.2.17.148.2	Belanja Barang dan Jasa	14,450,000.00	14,449,900.00	(100.00)	100.00
5.2.17.148.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.149	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	454,769,000.00	454,034,800.00	(734,200.00)	99.84
5.2.17.149.1	Belanja Pegawai	219,300,000.00	218,618,750.00	(681,250.00)	99.69
5.2.17.149.2	Belanja Barang dan Jasa	235,469,000.00	235,416,050.00	(52,950.00)	99.98
5.2.17.149.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.150	Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Lainnya	94,500,000.00	94,499,656.00	(344.00)	100.00
5.2.17.150.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.17.150.2	Belanja Barang dan Jasa	94,500,000.00	94,499,656.00	(344.00)	100.00
5.2.17.150.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.151	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	247,500,000.00	207,708,250.00	(39,791,750.00)	83.92
5.2.17.151.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.17.151.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
5.2.17.151.3	Belanja Modal	247,500,000.00	207,708,250.00	(39,791,750.00)	83.92

5.2.17.152	Sensus Barang Milik Daerah	1,084,702,000.00	983,086,200.00	(101,615,800.00)	90.63
5.2.17.152.1	Belanja Pegawai	203,335,000.00	197,335,000.00	(6,000,000.00)	97.05
5.2.17.152.2	Belanja Barang dan Jasa	881,367,000.00	785,751,200.00	(95,615,800.00)	89.15
5.2.17.152.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.153	Fasilitas Pelayanan Perpajakan	291,000,000.00	281,640,500.00	(9,359,500.00)	96.78
5.2.17.153.1	Belanja Pegawai	45,715,000.00	44,602,500.00	(1,112,500.00)	97.57
5.2.17.153.2	Belanja Barang dan Jasa	245,285,000.00	237,038,000.00	(8,247,000.00)	96.64
5.2.17.153.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.154	Penyusunan Pokok Ketetapan Pajak Terutang	358,000,000.00	348,622,300.00	(9,377,700.00)	97.38
5.2.17.154.1	Belanja Pegawai	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	100.00
5.2.17.154.2	Belanja Barang dan Jasa	356,570,000.00	347,192,300.00	(9,377,700.00)	97.37
5.2.17.154.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.155	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	75,000,000.00	72,340,000.00	(2,660,000.00)	96.45
5.2.17.155.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.17.155.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000.00	72,340,000.00	(2,660,000.00)	96.45
5.2.17.155.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.156	Fasilitas Percepatan Pelunasan PBB-P2	468,500,000.00	417,685,050.00	(50,814,950.00)	89.15
5.2.17.156.1	Belanja Pegawai	4,345,000.00	3,740,000.00	(605,000.00)	86.08
5.2.17.156.2	Belanja Barang dan Jasa	464,155,000.00	413,945,050.00	(50,209,950.00)	89.18
5.2.17.156.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.17.157	Layanan Informasi Perpajakan Daerah	105,000,000.00	103,665,000.00	(1,335,000.00)	98.73
5.2.17.157.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
5.2.17.157.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
5.2.17.157.3	Belanja Modal	105,000,000.00	103,665,000.00	(1,335,000.00)	98.73
5.2.17.158	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	76,341,000.00	69,807,500.00	(6,533,500.00)	91.44
5.2.17.158.1	Belanja Pegawai	11,250,000.00	11,087,500.00	(162,500.00)	98.56
5.2.17.158.2	Belanja Barang dan Jasa	65,091,000.00	58,720,000.00	(6,371,000.00)	90.21
5.2.17.158.3	Belanja Modal	-	-	-	-
5.2.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	344,500,000.00	343,345,000.00	(1,155,000.00)	99.66
5.2.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	344,500,000.00	343,345,000.00	(1,155,000.00)	99.66
5.2.23.01.1	Belanja Pegawai	132,597,000.00	131,882,000.00	(715,000.00)	99.46
5.2.23.01.2	Belanja Barang dan Jasa	211,903,000.00	211,463,000.00	(440,000.00)	99.79
5.2.23.01.3	Belanja Modal	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)		70,300,822,238.00	93,243,551,549.00	22,942,729,311.00	132.64

3. Keberhasilan yang telah dicapai

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah sesuai mekanisme yang telah ditentukan;
2. Terpeliharanya dan terkendalinya pengamanan asset milik daerah baik status keberadaan, kondisi dan jumlah barang yang dimiliki Daerah;
3. Terlaksananya Sensus Barang Daerah;

4. Tercapainya pelaporan dan kegiatan dengan baik;
5. Intensifikasi dilakukan secara periodik dan Ekstensifikasi dilakukan dalam rangka mencari potensi pajak baru;
6. Tercapainya pelaksanaan Intensifikasi PBB dan Pajak BPHTB;
7. Pendistribusian blangko PBB sampai di Kecamatan dan Kelurahan;
8. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerimaan Pajak Daerah;
9. Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Tanda Kepemilikan Tanah Kabupaten Grobogan.

4. Hambatan dan Kendala Target yang Telah Ditetapkan

Belanja TA 2018 terealisasi sebesar 92,85 persen dibandingkan dengan anggarannya, sedangkan realisasi belanja pada TA 2017 sebesar 91,72 persen. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA 2018 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Beberapa kegiatan sifatnya adalah penyediaan sehingga realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, seperti kegiatan-kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur juga untuk kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah.
2. Efisiensi anggaran karena selisih harga pasar saat ini dengan harga satuan yang ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
3. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan untuk anggaran pensertifikatan tanah sifatnya hanya penyediaan, pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional masih memprioritaskan program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan sertifikat tanah/ PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang harus diselesaikan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2018, capaian kinerja kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan, misi dan visi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan di tahun 2018 secara garis besar tidak ditemukan hambatan dan kendala berarti.

Lima puluh satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan telah terlaksana dengan baik secara *efektif dan efisien* untuk mencapai sasaran, misi, dan visi organisasi, sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2018.

Kematangan perencanaan, ketepatan kebijakan, keseriusan pelaksanaan, dan kekuatan pengendalian serta kebersamaan seluruh komponen dalam struktur organisasi menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan kinerja.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kinerja serta mengantisipasi penurunan kinerja dimasa mendatang diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengelola keuangan dan asset daerah dengan mengikuti berbagai kegiatan seminar, bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
2. Dalam menyusun program dan rencana kinerja tahunan agar berpegang teguh pada dokumen perencanaan/ rencana strategis organisasi yang telah ditetapkan;

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai asset utama dengan melaksanakan *reward and punishment* yang obyektif, peningkatan iman dan ketaqwaan, dan penanaman budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga sampai pada pengawasan, evaluasi dan pelaporan agar unit organisasi semakin solid sehingga dapat diperoleh sinkronisasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik;
5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dengan cara pembayaran non tunai dan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan pajak.

Purwodadi, Februari 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

WAHYU SUSETIJONO, SH, MM
NIP. 19680418 199303 1 004